

negara (SBN) sekitar Rp 540 triliun tahun akan diterbitkan pemerintah sepanjang tahun ini dengan asumsi defisit APBN 2,2% dari produk domestik bruto (PDB), porsi SPN yang diterbitkan masih sangat kecil.

"Tapi, jika pemerintah bisa menerbitkan SPN lebih banyak, misalnya SPN enam bulan atau maksimal satu tahun, *rate* (suku bunga) yang harus dibayar menjadi lebih murah. Jadi, *cost* bagi APBN juga menjadi lebih murah," ujar

masing 5,96%, 6,05%, 6,26%, dan 6,29%. Keberadaan SPN dalam jumlah yang lebih banyak, menurut Mirza, juga akan menjadi instrumen bagi bank-bank untuk menempatkan kelebihan likuiditas jangka pendek mereka yang saat ini mencapai sekitar Rp 300 triliun. Jadi, dari sisi perbankan, SPN bisa menjadi instrumen untuk penempatan dana sementara, sedangkan dari sisi pemerintah biaya yang harus ditanggung APBN untuk beban suku

Menurut Mirza, selama ini pemerintah khawatir kalau menerbitkan instrumen keuangan jangka pendek, akan menghadapi masalah atau tidak ada yang bersedia membeli kalau harus dilakukan *rolle over*. Namun, BI berkemungkinan, hal itu saat ini tidak akan terjadi. "Instrumen jangka panjang saja asing ada yang mau beli, pasti yang jangka pendek juga ada yang mau beli," ujar dia.

BI *rate* menjadi BI 7 Day Repo Rate oleh BI juga ditupikan untuk mendalam instrumen pasar uang repo. "Karena instrumen operasi moneter yang paling likuid, setelah instrumen *overnight* (O/N) itu repo tujuh hari. Maka itu kami merformulasi BI *rate* menjadi BI 7 Day Repo Rate," jelas dia.

Langkah Tepat Pada kesempatan yang sama, baik direktur utama dan Andry, BI menguraikan Rate pada Juli efektif mengmendatang. 6,75% atau per men operasi suku bunga tujuh hari be

Reliance Securities

PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Reliance Securities, Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta pada hari Kamis, 2 Juni 2016.

Panggilan Rapat akan dimat dalam iklan pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berpedoman nasional, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan (www.reliance-securities.com) pada 11 Mei 2016.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada penutupan buku PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI tanggal 10 Mei 2016.

Setiap Usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam Agenda Rapat dengan ketentuan memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu usul yang bersangkutan (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan, (ii) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum penutupan Rapat, yaitu pada tanggal 4 Mei 2016 dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Jakarta, 26 April 2016
PT Reliance Securities, Tbk
Direksi

www.reliance.com

Your reliable partner



PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk. ("Perseroan") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK-04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan



PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka memenuhi pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan ini kami selaku Direksi Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Timur, memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") yang akan dilaksanakan di Jakarta pada hari Kamis, 2 Juni 2016.

Panggilan untuk Rapat akan dimunculkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, berpedoman nasional pada hari Selasa, 11 Mei 2016, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Direksi.

Pihak-pihak yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 10 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat bila memenuhi persyaratan dalam pasal 11 ayat (5) anggaran dasar Perseroan yang telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih dari pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan harus sudah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penutupan Rapat.

Jakarta, 26 April 2016
Direksi Perseroan



PT JAWA PARI STEEL Tbk. PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT JAWA PARI STEEL Tbk. Berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut **PERSEROAN**) bahwa perseroan akan mengadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** pada tanggal **02 Juni 2016** dan yang berhak hadir atau mewakili hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan tanggal **10 Mei 2016** sampai pukul 16.00 WIB.

BI *rate* menjadi BI 7 Day Repo Rate oleh BI juga ditupikan untuk mendalam instrumen pasar uang repo. "Karena instrumen operasi moneter yang paling likuid, setelah instrumen *overnight* (O/N) itu repo tujuh hari. Maka itu kami merformulasi BI *rate* menjadi BI 7 Day Repo Rate," jelas dia.

Langkah Tepat Pada kesempatan yang sama, baik direktur utama dan Andry, BI menguraikan Rate pada Juli efektif mengmendatang. 6,75% atau per men operasi suku bunga tujuh hari be

BI: Tekanan Inflasi 2016 Masih dari

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan tantangan mengendalikan inflasi 2016 masih berasal dari harga bahan pangan yang bergelolak (*volatile food*). Karena itu, BI berupaya mengendalikan inflasi dengan berbasiskan komoditas unggulan (klaster) dalam rangka mendorong sisi penawaran.

Kini, BI telah mengidentifikasi lima komoditas utama yang menjadi sumber tekanan inflasi, yaitu beras, bawang merah, cabai, bawang putih, dan daging sapi.

Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, adanya klaster-klaster yang sudah berjalan sejak 2006 itu menjadi terobosan yang bisa ditiru oleh masyarakat yang lain. Dia mencontohkan, untuk bawang putih saja melalui klaster 1 hektare (ha) bisa membuat produksi 22 ton, sehingga tidak harus bergantung pada impor. "Lebih dari 100 klaster itu bentuk bentuk terobosan, supaya bisa ditiru oleh masyarakat yang lain. Memang tantangan inflasi di Indonesia ke depan masih *volatile food*. Kami men-

gajak seluruh masyarakat Indonesia sehingga harga pangan bergelolak tidak lagi menjadi ancaman inflasi," ungkap Agus, di Gedung BI Jakarta, Senin (25/4).

Agus mengungkapkan, BI masih optimis inflasi akan bergerak sesuai sasaran 4 plus minus 1% pada 2016 dan 2017. Serta 3,5 plus minus 1% pada 2018. Dia juga mengatakan, selain berfokus pada *volatile food*, tentunya inflasi inti dan inflasi *administered price* harus tetap bisa dikendalikan. BI pun mendorong agar sektor ritel dari sisi penawaran menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar keuangan. Sedangkan dari *administered price* berkaitan pada kepastian waktu pelaksanaan rencana kebijakan *administered price*.

Dia mengatakan, sumber dari *administered price* tersebut yakni subsidi energi yang biasanya berjajol karena harga minyak dunia yang tinggi. Otonomis hal tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan inflasi tinggi. "Saat ini sudah

BKPM Usulkan Harta Bersih WP Masuk I

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, setuju terhadap implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPD) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga turut dihadiri Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Davit Pantoran hancoran Ithm In-

ke Oligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh menteri dengan jangka waktu paling singkat tiga tahun. "BKPM usulkan agar WP yang mendapatkan fasilitas ini diarahkan untuk berinvestasi langsung ke sektor-sektor industri tanpa harus investasi ke SBN. Dengan batas waktu dari tiga tahun menjadi 5 tahun men-